

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE
TAHUN ANGGARAN 2021
Audited



UAKPA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALU



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Pusat. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 13 Mei 2022
Kepala Kantor,

Krisdianto
NIP 198105242001121001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55 Palu 94117
TELEPON (0451), SUREL: KPKNLPALU@KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 13 Mei 2022

Kepala Kantor,

Krisdianto
NIP 198105242001121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Tahun Anggaran 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2021 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.812.559.872 atau mencapai 167% dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.887.622.000

Realisasi Belanja Negara TA 2021 Audited adalah sebesar Rp1.372.069.509 atau mencapai 97,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.414.463.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.996.634.370,6 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp29.555.096,6 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.967.079.274 serta Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.536.119,6 dan Rp42.988.098.251.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.778.320.702 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.011.939.463 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.766.381.239, Kegiatan Non Operasional Surplus sebesar Rp17.146.436 dan Pos-Pos Luar Biasa tidak ada realisasi, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.783.527.675.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp48.718.036.951 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.783.527.675 dan dikurangi Penurunan Ekuitas sebesar (Rp5.729.938.700) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp42.988.098.251.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.887.622.000	4.812.559.872	166,7	2.466.005.883
JUMLAH PENDAPATAN		2.887.622.000	4.812.559.872	166,7	2.466.005.883
BELANJA					
Belanja Negara					
Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	1.056.682.689
Belanja Barang	B.3	1.352.564.000	1.310.270.510	96,9	1.472.279.784
Belanja Modal	B.4	61.899.000	61.798.999	99,8	300.200.000
Jumlah Belanja Operasi		1.414.463.000	1.372.069.509	97,0	2.829.162.473
JUMLAH BELANJA		1.414.463.000	1.372.069.509	97,0	2.829.162.473

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PALU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	514.167	1.245.837
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	6.099.999,6	1
Persediaan	C.4	22.940.930	38.516.769
Jumlah Aset Lancar		29.555.096,6	39.762.607
ASET TETAP			
Tanah	C.5	32.864.083.988	37.936.460.000
Peralatan dan Mesin	C.6	4.067.822.447	4.309.319.172
Gedung dan Bangunan	C.7	9.433.649.730	9.764.137.730
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	324.878.000	324.878.000
Aset Tetap Lainnya	C.9	4.940.000	4.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(3.728.294.891)	(3.677.999.155)
Jumlah Aset Tetap		42.967.079.274	48.661.735.747
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.11	0	1.210.393.222
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	0	(1.193.854.624)
Jumlah Aset Lainnya		0	16.538.598
JUMLAH ASET		42.966.634.370,6	48.718.036.952
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	8.536.119,6	1
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.536.119,6	1
JUMLAH KEWAJIBAN		8.536.119,6	1
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	42.988.098.251	48.718.036.951
JUMLAH EKUITAS		42.988.098.251	48.718.036.951
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.996.634.371	48.718.036.952

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.778.320.702	2.400.119.509
JUMLAH PENDAPATAN		4.778.320.702	2.400.199.509
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	1.041.225.689
Beban Persediaan	D.3	93.658.839	90.564.170
Beban Barang dan Jasa	D.4	775.026.880	751.324.280
Beban Pemeliharaan	D.5	307.330.328	337.037.880
Beban Perjalanan Dinas	D.6	152.266.422	279.764.854
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	683.656.994	740.026.262
JUMLAH BEBAN		2.011.939.463	3.239.943.135
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.766.381.239	(839.823.626)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		17.146.436	67.132.211
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(1.956.650)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	17.146.436	65.175.561
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.783.527.675	(774.648.065)
SURPLUS/DEFISIT LO		2.783.527.675	(774.648.065)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	48.718.036.951	49.012.909.444
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.783.527.675	(774.648.065)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(8.513.466.375)	479.775.572
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.729.938.700)	(294.872.493)
EKUITAS AKHIR	E.6	42.988.098.251	48.718.036.951

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Visi DJKN tersebut juga dalam rangka

mendukung visi Kementerian Keuangan dimana DJKN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan itu sendiri.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain arah kebijakan nasional dan Kementerian Keuangan, untuk mendorong tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024. Adapun Arah Kebijakan dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);

- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Lelang.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan web e-rekon-ik yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - d. Pengeluaran untuk ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dikenakan pengurangan dana untuk penyesuaian Anggaran Belanja DJKN 2021 dalam rangka Refocusing Anggaran melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2021		
	ANGGARAN	ANGGARAN	+/-
	AWAL	SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.887.622.000	2.887.622.000	-
Jumlah Pendapatan	2.887.622.000	2.887.622.000	-
Belanja			
Belanja Barang	1.682.023.000	1.352.564.000	(329.459.000)
Belanja Modal	109.299.000	61.899.000	(47.400.000)
Jumlah Belanja	1.791.322.000	1.414.463.000	-376.859.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja barang terdiri dari Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp13.825.000, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat sebesar Rp5.400.000, Belanja Bahan sebesar Rp37.473.000, Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp6.750.000, Belanja Langganan Listrik sebesar Rp26.400.000, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.130.000, Belanja Langganan Telepon sebesar Rp600.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp261.499.000, Belanja Modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp47.400.000.

Penambahan Pagu belanja terdiri Belanja Barang Operasional – Penangan Pandemi sebesar Rp7.485.000, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp2.029.000, Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp7.837.000, Belanja Jasa-Penangan Pandemi Covid-19 sebesar Rp8.550.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota bertambah sebesar Rp8.100.000, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp5.617.000.

Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Rp4.812.559.872

Pendapatan

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.812.559.872. Keseluruhan Pendapatan Negara berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	33.507.500	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	500.000	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4.028.250	0
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	899.000.000	1.291.073.651	143,6
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.988.000.000	3.356.862.992	168,9
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	622.000	126.139.920	20279,7
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak	0	20.105	0
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	427.454	0
Jumlah	2.887.622.000	4.812.559.872	166,7

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 51,2% dibandingkan dengan TA 2020. Hal ini disebabkan kenaikan Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan	4.812.559.872	2.466.055.883	2.346.503.989	51,2%
JUMLAH	4.812.559.872	2.466.055.883	2.346.503.989	51,2%

Realisasi Belanja
Rp1.372.069.509

Belanja

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.372.069.509 atau sebesar 97% dari anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp1.414.463.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0%
52	Belanja Barang	1.352.564.000	1.310.270.510	96,9%
53	Belanja Modal	61.899.000	61.798.999	99,8%
Jumlah		1.414.463.000	1.372.069.509	97,0%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami selisih kurang (penurunan) sebesar Rp1.457.092.964 atau sebesar -51,5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Perbandingan Realisasi Belanja 2021 dan 2020

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	REALISASI		NAIK/(TURUN)	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	1.056.682.689	-1.056.682.689	-100,0%
52	Belanja Barang	1.310.270.510	1.472.279.784	-162.009.274	-11,0%
53	Belanja Modal	61.798.999	300.200.000	-238.401.001	-79,4%
Jumlah		1.372.069.509	2.829.162.473	-1.457.092.964	-51,5%

Belanja Pegawai
Rp0

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.056.682.689. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2021 mengalami penurunan 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 karena pada bulan oktober 2020 pengelolaan belanja pegawai KPKNL Palu sudah tersentralisasi oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2021 sudah tidak ada anggaran belanja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Belanja Gaji Pokok PNS	0	743.543.700
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	11.476
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	49.552.980
Belanja Tunj. Anak PNS	0	14.832.630
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	54.900.000
Belanja Tunj.Fungsional PNS	0	6.480.000
Belanja Tunj. PPh PNS	0	1.200.963
Belanja Tunj. Beras PNS	0	35.196.120
Belanja Uang Makan PNS	0	126.225.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	24.740.000
Belanja Uang Lembur	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	1.056.682.869
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	180
Realisasi Belanja Netto	0	1.056.682.689

Belanja Barang
Rp1.310.270.510

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.310.270.510 dan Rp1.472.279.784. Realisasi

Belanja Barang periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp162.009.274) atau -11% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK/(TURUN)	
			Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	419.424.981	397.372.201	22.052.780	5,5%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	953.500	-953.500	100,0%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.580.980	15.283.680	7.297.300	47,7%
Belanja Honor Operasional Satker	136.200.000	136.620.000	-420.000	-0,3%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	19.690.140	30.303.778	-10.613.638	100,0%
Belanja Bahan	5.311.000	7.171.500	-1.860.500	-25,9%
Belanja Honor Output Kegiatan	-	6.750.000	-6.750.000	100,0%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.100.000	-	0	100,0%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78.083.000	101.386.750	-23.303.750	-23,0%
Belanja Langganan Listrik	116.153.832	100.786.548	15.367.284	15,2%
Belanja Langganan Telepon	16.728.827	11.599.093	5.129.734	44,2%
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	25.401.000	47.250.000	-21.849.000	100,0%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186.302.300	221.465.640	-35.163.340	-15,9%
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	121.028.028	115.572.240	5.455.788	4,7%
Belanja Perjalanan Biasa	109.206.422	248.364.854	-139.158.432	-56,0%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.060.000	31.400.000	11.660.000	37,1%
Realisasi Belanja Bruto	1.310.270.510	1.472.279.784	-162.009.274	-11,0%
<i>Pengembalian Belanja</i>			0	
Realisasi Belanja Netto	1.310.270.510	1.472.279.784	-162.009.274	-11,0%

Belanja Modal
Rp61.798.999

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.798.999 sedangkan pada 31 Desember 2020 realisasi Belanja Modal sebesar Rp300.200.000. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp238.401.001 atau -79,4%. Hal ini disebabkan adanya penghematan yang dilakukan karena masih adanya Pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.798.999	300.200.000	-79,4%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	
Jumlah Belanja	61.798.999	300.200.000	-79,4%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp514.167

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp514.167 dan Rp1.245.837.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan pajak.

Kas lainnya dan setara
kas Rp6.099.999,6

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.099.999,6 dan Rp1.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Persediaan
Rp22.940.930

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp22.940.930 dan Rp38.516.769.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Tanah setelah dilakukan koreksi pada periode 13 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

NUP	Luas	Lokasi	Nilai
1	3530 m2	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 , Palu	19.011.571.000
1	625 m2	Jl. D.I Panjaitan	2.059.217.000
2	6201 m2	Jl. S. Parman, Palu	11.793.295.988
Jumlah			32.864.083.988

Peralatan dan Mesin
Rp4.067.822.447

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4.067.822.447 dan Rp4.309.319.172.

Gedung dan Bangunan
Rp9.433.649.730

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.433.649.730 dan Rp9.764.137.730. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp324.878.000

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp324.878.000. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp4.940.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.940.000. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp3.728.294.891)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp3.728.294.891) dan (Rp3.677.999.155).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Peralatan dan Mesin	2,886,907,351	2,694,204,121
Gedung dan Bangunan	684,324,938	861,041,148
Jalan dan Jembatan	151,814,227	118,221,198
Jaringan	5,248,375	4,532,688
JUMLAH	3,728,294,891	3,677,999,155

Aset Lain-Lain
Rp0

C.10 Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp1.210.393.222.

Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.11 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp0 dan (Rp1.193.854.624). Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp4.778.320.702

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.778.320.702 dan Rp2.400.119.509. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER	31 DESEMBER	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	0	8.406.294	(8.406.294)	-100,0%
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)	3.296.580	5.370.435	(2.073.855)	-38,6%
3	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (425782)	1.291.073.651	1.177.637.460	113.436.191	9,6%
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	3.356.862.992	1.194.597.582	2.162.265.410	181,0%
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	126.139.920	3.953.935	122.185.985	3090,2%
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak (425995)	20.105	3.802	16.303	428,8%
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)	427.454	10.150.001	(9.722.547)	-95,8%
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	-	-	-	0,0%
9	Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	500.000	-	500.000	100,0%
Jumlah		4.778.320.702	2.400.119.509	2.378.201.193	99,1%

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.041.225.689. Pada bulan Oktober 2020, Belanja Pegawai sudah diberlakukan sentralisasi yang menjadi tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun anggaran 2021 sudah tidak ada anggaran untuk belanja Pegawai di KPKNL Palu. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
			(Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	743.543.700	(743.543.700)	-100,0%
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	0,0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	11.296	(11.296)	-100,0%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	0,0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	49.552.980	(49.552.980)	-100,0%
Pengembalian Belanja Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	0,0%
Beban Tunj. Anak PNS	-	14.832.630	(14.832.630)	-100,0%
Beban Tunj. Struktural PNS	-	54.900.000	(54.900.000)	-100,0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	6.480.000	(6.480.000)	-100,0%
Beban Tunj. PPh PNS	-	1.200.963	(1.200.963)	-100,0%
Beban Tunj. Beras PNS	-	35.196.120	(35.196.120)	-100,0%
Beban Uang Makan PNS	-	110.768.000	(110.768.000)	-100,0%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	-	0,0%
Beban Tunjangan Umum PNS	-	24.740.000	(24.740.000)	-100,0%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	0,0%
Beban Uang Lembur	-	-	-	0,0%
Jumlah	-	1.041.225.689	(1.041.225.689)	-100,0%

Beban Persediaan
Rp93.658.839

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp93.658.839 dan Rp90.564.170. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Beban Persediaan Konsumsi	93.658.839	90.564.170
Jumlah Beban Persediaan	93.658.839	90.564.170

Beban Barang dan
Jasa
Rp775.026.880

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp775.026.880 dan Rp751.324.280. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	419.424.981	396.772.201	22.652.780	5,7%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	953.500	(953.500)	-100,0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25.017.100	13.117.660	11.899.440	90,7%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136.200.000	136.620.000	(420.000)	-0,3%
Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.690.140	30.303.778	(10.613.638)	-35,0%
Beban Bahan	5.311.000	7.171.500	(1.860.500)	-25,9%
Beban Honor Output Kegiatan	-	6.750.000	(6.750.000)	-100,0%
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	0,0%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.100.000	-	11.100.000	0,0%
Beban Langganan Telepon	16.728.827	11.599.093	5.129.734	44,2%
Beban Langganan Listrik	116.153.832	100.786.548	15.367.284	15,2%
Belanja Modal BLU	-	-	-	0,0%
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	25.401.000	47.250.000	(21.849.000)	-46,2%
Jumlah	775.026.880	751.324.280	23.702.600	3,2%

Terdapat realisasi periode 31 Desember 2021 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp19.690.140 pada akun 521311 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dan sebesar Rp25.401.000 pada akun 522192 Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban
Pemeliharaan
Rp307.330.328

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp307.330.328 dan Rp337.037.880. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.028.028	221.465.640	(100.437.612)	-45,4%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186.302.300	115.572.240	70.730.060	61,2%
Jumlah	307.330.328	337.037.880	(29.707.552,00)	-8,8%

Beban Perjalanan
Dinas
Rp152.266.422

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp152.266.422 dan Rp279.764.854. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	109.206.422	248.364.854	(139.158.432)	-56,0%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.060.000	31.400.000	11.660.000	37,1%
Jumlah	152.266.422	279.764.854	(127.498.432,00)	-45,6%

Terjadi penurunan perjalanan dinas biasa pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Sulawesi Tengah dalam rangka mengurangi angka tertularnya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan rencana kerja / perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp683.656.994

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp683.656.994 dan Rp740.026.262. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Mesin	495.576.488	542.556.655	- 46.980.167	-8,7%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	153.771.790	153.771.791	- 1	0,0%
Jembatan	33.831.591	33.831.591	-	0,0%
Beban Penyusutan Jaringan	477.125	477.125	-	0,0%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	9.389.100	- 9.389.100	100,0%
Jumlah Penyusutan	683.656.994	740.026.262	- 56.369.268	-7,6%
Amortisasi	683.656.994	740.026.262	- 56.369.268	-7,6%

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp17.146.436

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	2.072.150	- 2.072.150	0,0%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	115.500	- 115.500	0,0%
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.956.650	1.956.650	-100,0%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	17.146.436	67.132.211	- 49.985.775	-74,5%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	17.146.436	65.175.561	- 48.029.125	-73,7%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp48.718.036.951*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp48.718.036.951 dan Rp49.012.909.444.

*Surplus/(Defisit) LO
Rp2.783.527.675*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.783.527.675 dan (Rp774.648.065), Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih atau kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi /
Kesalahan
Mendasar
Rp -*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp0*

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp -*

Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp5.072.376.012

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.072.376.012 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
(Rp8.513.466.375)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp8.513.466.375) dan Rp479.775.572.

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Diterima dari Entitas Lain	(4.812.559.872)	479.775.572
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.372.069.509	
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	(5.072.976.012)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-

Ekuitas Akhir
Rp42.988.098.251

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp42.988.098.251 dan Rp48.718.036.951.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dilaksanakan Uji Coba (*Piloting*) Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran atas Gaji (beserta tunjangan yang melekat), Gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur.

Adapun waktu pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu adalah Tahap III pada bulan Oktober 2020, yang kemudian akan diimplementasikan secara penuh mulai tahun anggaran 2021. Oleh sebab itu, pada bulan Oktober 2020, Kantor Pusat DJKN telah mulai menarik anggaran belanja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu sebesar Rp862.840.000. Prognosa kebutuhan belanja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu sampai dengan September 2020 sudah disampaikan, dan apabila masih ada sisa pada akhir tahun, akan dilakukan revisi anggaran guna menarik dana tersebut.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Adanya Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia mengakibatkan Penyerapan Anggaran tidak maksimal dikarenakan tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada bulan Maret s.d. Juni 2020 khususnya kegiatan perjalanan dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND-65/SJ/2021 tanggal 14 Januari 2021 dan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-31/KN/2021 tanggal 25 Januari 2021 hal Penyesuaian Anggaran Belanja DJKN 2021 Dalam Rangka Penghematan Belanja Kementerian Keuangan TA 2021, dimana Dalam melakukan penghematan tersebut, seluruh unit kerja di lingkup DJKN agar memperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni (RM);
- b. Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Modal;

- c. Belanja Barang Operasional (Rincian Output Operasionalisasi Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, serta Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) dikecualikan dari perhitungan penghematan; dan
- d. Kegiatan Strategis (Prioritas Unggulan) Unit Eselon I DJKN dikecualikan dari identifikasi penghematan.

Sesuai surat tersebut diatas, jumlah porsi penyesuaian/penghematan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu TA 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN sebesar :

Uraian	2021		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	+/-
Belanja			
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	1.682.023.000	1.353.564.000	(328.459.000)
Belanja Modal	109.299.000	61.899.000	(47.400.000)
Jumlah Belanja	1.791.322.000	1.415.463.000	-375.859.000

Dalam melakukan Revisi Anggaran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 2/PB/2021 Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021, yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran, serta menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran dan outstanding kontrak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan periode terakhir agar tidak terjadi pagu minus.

Selain adanya penyesuaian/penghematan belanja diatas, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, dimana telah di tetapkan beberapa akun belanja khusus penanganan COVID-19, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu telah melakukan penambahan akun khusus COVID-19 pada Output Layanan Perkantoran: pada detail Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19, anggaran setelah revisi sebesar Rp20.165.000 dan pada detail Akun 522192

Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 anggaran setelah revisi sebesar Rp34.650.000 pada tahun anggaran 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan anggaran untuk COVID-19 tersebut akan bertambah/berkurang sesuai kebutuhan organisasi kedepannya.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU 538002

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 15/05/22 8:23 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_saiker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.887.622,000	4.812.559,872	1.924.937,872	167	1.987.922,000	2.466.005,883	478.083,883	124
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2.887.622,000	4.812.559,872	1.924.937,872	167	1.987.922,000	2.466.005,883	478.083,883	124
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1.084.014,000	1.056.682,689	(27.331,311)	97
	BELANJA BARANG	1.352.564,000	1.310.270,510	(42.293,490)	97	1.753.395,000	1.472.279,784	(281.115,216)	84
	BELANJA MODAL	61.899,000	61.798,999	(100,001)	100	300.200,000	300.200,000	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1.414.463,000	1.372.069,509	(42.393,491)	97	3.137,609,000	2.829,162,473	(308,446,527)	90
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
 ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
 SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU 538002

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 15/05/22 8:23 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_saker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.887.622.000	4.812.559.872	1.924.937.872	167	1.987.922.000	2.466.005.883	478.083.883	124
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2.887.622.000	4.812.559.872	1.924.937.872	167	1.987.922.000	2.466.005.883	478.083.883	124
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1.084.014.000	1.056.882.689	(27.331.311)	97
	BELANJA BARANG	1.352.564.000	1.310.270.510	(42.293.490)	97	1.753.395.000	1.472.279.784	(281.115.216)	84
	BELANJA MODAL	61.899.000	61.798.999	(100.001)	100	300.200.000	300.200.000	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1.414.463.000	1.372.069.509	(42.393.491)	97	3.137.609.000	2.829.162.473	(308.446.527)	90
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 016
SATUAN KERJA : 538002
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Sulut Tenggong Malut
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 15/05/22 8:50 PM
Halaman : 1
Pg ID : lap_jra_bel_akun -
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	443.020.000	429.195.000	419.424.981	0	419.424.981	97,72	9.770.019
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30.000.000	24.600.000	22.580.980	0	22.580.980	91,79	2.019.020
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	136.200.000	136.200.000	136.200.000	0	136.200.000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	12.680.000	20.165.000	19.690.140	0	19.690.140	97,65	474.860
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	621.900.000	610.160.000	597.896.101	0	597.896.101	97,99	12.263.899
5212	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	443.020.000	429.195.000	419.424.981	0	419.424.981	97,72	9.770.019
521211	Belanja Barang Non Operasional	6.750.000	5.472.000	5.311.000	0	5.311.000	97,06	161.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.363.000	11.200.000	11.100.000	0	11.100.000	99,11	100.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	53.058.000	16.672.000	16.411.000	0	16.411.000	98,43	261.000
5218	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6.750.000	5.472.000	5.311.000	0	5.311.000	97,06	161.000
521811	Belanja Barang Persediaan	76.851.000	78.880.000	78.083.000	0	78.083.000	98,99	797.000
5221	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	76.851.000	78.880.000	78.083.000	0	78.083.000	98,99	797.000
522111	Belanja Jasa	144.000.000	117.600.000	116.153.832	0	116.153.832	98,77	1.446.168
522112	Belanja Langganan Listrik	18.000.000	17.400.000	16.728.827	0	16.728.827	96,14	671.173
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	26.100.000	34.650.000	25.401.000	0	25.401.000	73,31	9.249.000
5231	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	188.100.000	169.650.000	158.283.659	0	158.283.659	93,3	11.366.341
523111	Belanja Pemeliharaan	204.329.000	187.199.000	186.302.300	0	186.302.300	99,52	896.700
523121	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.450.000	134.067.000	121.028.028	0	121.028.028	90,27	13.038.972
5241	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	332.779.000	321.266.000	307.330.328	0	307.330.328	95,66	13.935.672
524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	372.135.000	110.636.000	109.206.422	0	109.206.422	98,71	1.429.578
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.200.000	45.300.000	43.060.000	0	43.060.000	95,06	2.240.000
53	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	409.335.000	155.936.000	152.266.422	0	152.266.422	97,65	3.669.578
5321	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.662.023.000	1.352.564.000	1.310.270.510	0	1.310.270.510	96,87	42.293.490
532111	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.299.000	61.899.000	61.798.999	0	61.798.999	99,84	100.001
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.299.000	61.899.000	61.798.999	0	61.798.999	99,84	100.001
53	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	109.299.000	61.899.000	61.798.999	0	61.798.999	99,84	100.001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 016
 SATUAN KERJA : 538002
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 15/05/22 8:50 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun -
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	1.791.322.000	1.414.463.000	1.372.069.509	0	1.372.069.509	97	42.393.491

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

KDUAPPAW : 01509016KD

Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut

KODE SATKER : 538002

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

Tgl. Cetak 15/05/2022 8:24 PM
lap_neraca_satker_komparatif-rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	514,167	1,245,837	(731,670)	(58.73)
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,099,999.6	1	6,099,999	1,016,666,500.0
Persediaan	22,940,930	38,516,769	(15,575,839)	(40.44)
JUMLAH ASET LANCAR	29,555,096.6	39,762,607	(10,207,510)	(25.67)
ASET TETAP				
Tanah	32,864,083,988	37,936,460,000	(5,072,376,012)	(13.37)
Peralatan dan Mesin	4,067,822,447	4,309,319,172	(241,496,725)	(5.60)
Gedung dan Bangunan	9,433,649,730	9,764,137,730	(330,488,000)	(3.38)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	324,878,000	324,878,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,940,000	4,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,728,294,891)	(3,677,999,155)	(50,295,736)	1.37
JUMLAH ASET TETAP	42,967,079,274	48,661,735,747	(5,694,656,473)	(11.70)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	1,210,393,222	(1,210,393,222)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(1,193,854,624)	1,193,854,624	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	16,538,598	(16,538,598)	(100.00)
JUMLAH ASET	42,996,634,370.6	48,718,036,952	(5,721,402,581)	(11.74)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,536,119.6	1	8,536,119	1,422,686,500.0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8,536,119.6	1	8,536,119	1,422,686,500
JUMLAH KEWAJIBAN	8,536,119.6	1	8,536,119	1,422,686,500
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	42,988,098,251	48,718,036,951	(5,729,938,700)	(11.76)
JUMLAH EKUITAS	42,988,098,251	48,718,036,951	(5,729,938,700)	(11.76)
JUMLAH EKUITAS	42,988,098,251	48,718,036,951	(5,729,938,700)	(11.76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	42,996,634,371	48,718,036,952	(5,721,402,581)	(11.74)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 016	KANWIL XVI DJKN MANADO	Tanggal : 15/05/22 8:26 PM
SATUAN KERJA	: 538002	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PALU	Prg ID : lap_lo_satker -
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,778,320,702	2,400,119,509	2,378,201,193	99.087
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,778,320,702	2,400,119,509	2,378,201,193	99.087
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,778,320,702	2,400,119,509	2,378,201,193	99.087
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,041,225,689	(1,041,225,689)	(100)
Beban Persediaan	93,658,839	90,564,170	3,094,669	3.417
Beban Barang dan Jasa	775,026,880	751,324,280	23,702,600	3.155
Beban Pemeliharaan	307,330,328	337,037,880	(29,707,552)	(8.814)
Beban Perjalanan Dinas	152,266,422	279,764,854	(127,498,432)	(45.573)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 016	KANWIL XVI DJKN MANADO	Tanggal : 15/05/22 8:26 PM
SATUAN KERJA	: 538002	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PALU	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	683,656,994	740,026,262	(56,369,268)	(7.617)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,011,939,463	3,239,943,135	(1,228,003,672)	(37.902)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,766,381,239	(839,823,626)	3,606,204,865	(429.4)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	17,146,436	67,132,211	(49,985,775)	(74.459)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	33,507,500	67,132,211	(33,624,711)	(50.087)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	16,361,064	0	16,361,064	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(1,956,650)	1,956,650	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	115,500	(115,500)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,072,150	(2,072,150)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	17,146,436	65,175,561	(48,029,125)	(73.692)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,783,527,675	(774,648,065)	3,558,175,740	(459.328)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,783,527,675	(774,648,065)	3,558,175,740	(459.328)

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 16-05-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN PERPAJAKAN		
	Pendapatan Pajak Penghasilan	0
	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
	Pendapatan Cukai	0
	Pendapatan Pajak Lainnya	0
	Pendapatan Bea Masuk	0
	Pendapatan Bea Keluar	0
	Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
	Pendapatan Sumber Daya Alam	0
	Pendapatan Baglan Pemerintah atas Laba	0
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,778,320,702
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	126,139,920
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	20,105
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	500,000
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,356,862,992
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3,296,580
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-Hain	427,454
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,291,073,651
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,778,320,702
PENDAPATAN HIBAH		
	Pendapatan Hibah	0
	Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)		4,778,320,702
BEBAN OPERASIONAL		
	Beban Pegawai	0
	Beban Persediaan	93,658,839
593111	Beban Persediaan konsumsi	93,658,839
	Beban Barang dan Jasa	775,026,880
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	25,401,000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,017,100
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136,200,000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,100,000
521211	Beban Bahan	5,311,000
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,690,140
522111	Beban Langganan Listrik	116,153,832

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 16-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
SATUAN KERJA :538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
522112	Beban Langganan Telepon	16,728,827
521111	Beban Keperluan Perkantoran	419,424,981
	Beban Pemeliharaan	307,330,328
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186,302,300
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121,028,028
	Beban Perjalanan Dinas	152,266,422
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	109,208,422
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,060,000
	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
	Beban Bunga	0
	Beban Subsidi	0
	Beban Hibah	0
	Beban Bantuan Sosial	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	683,656,994
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	153,771,790
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	495,576,488
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33,831,591
591313	Beban Penyusutan Jaringan	477,125
	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
	Beban Transfer	0
	Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)		2,011,939,463
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)		2,766,381,239
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
521211	Beban Bahan	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
522111	Beban Langganan Listrik	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 16-05-2022
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
SATUAN KERJA :538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
591313	Beban Penyusutan Jaringan	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
522112	Beban Langganan Telepon	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	33,507,500
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	33,507,500
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	16,361,064
596111	Kerugian Pelepasan Aset	16,361,064
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	17,146,436
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
	Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		17,146,436
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		2,783,527,675
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
596111	Kerugian Pelepasan Aset	
521211	Beban Bahan	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
522111	Beban Langganan Listrik	

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 16-05-2022
 Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI :1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA :538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	
591313	Beban Penyusutan Jaringan	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadalan	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
522112	Beban Langganan Telepon	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa		0
Beban Luar Biasa		0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		2.783,527,675

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 16-05-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2020
1		2
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN PERPAJAKAN		
Pendapatan Pajak Penghasilan		0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0
Pendapatan Cukai		0
Pendapatan Pajak Lainnya		0
Pendapatan Bea Masuk		0
Pendapatan Bea Keluar		0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
Pendapatan Sumber Daya Alam		0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		2,400,119,509
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	3,953,935
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,406,294
425995	Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	3,802
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,194,597,582
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5,370,435
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	10,150,001
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,177,637,460
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		2,400,119,509
PENDAPATAN HIBAH		
Pendapatan Hibah		0
Jumlah Pendapatan Hibah		0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)		2,400,119,509
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai		1,041,225,689
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,200,963
511126	Beban Tunj. Beras PNS	35,196,120
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,480,000
511129	Beban Uang Makan PNS	110,768,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24,740,000
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	54,900,000
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,552,980
511111	Beban Gaji Pokok PNS	743,543,700
511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,832,630
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,296

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 18-05-2022
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2020
1		2
Beban Persediaan		90,564,170
593111	Beban Persediaan konsumsi	90,564,170
Beban Barang dan Jasa		751,324,280
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	47,250,000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,117,660
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136,620,000
521211	Beban Bahan	7,171,500
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,303,778
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	953,500
522111	Beban Langganan Listrik	100,786,548
521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,750,000
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
522112	Beban Langganan Telepon	11,599,093
521111	Beban Keperluan Perkantoran	396,772,201
Beban Pemeliharaan		337,037,880
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	221,465,640
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115,572,240
Beban Perjalanan Dinas		279,764,854
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	248,364,854
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,400,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		0
Beban Bunga		0
Beban Subsidi		0
Beban Hibah		0
Beban Bantuan Sosial		0
Beban Penyusutan dan Amortisasi		740,026,262
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	153,771,791
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	542,556,655
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33,831,591
591313	Beban Penyusutan Jaringan	477,125
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	9,389,100
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih		0
Beban Transfer		0
Beban Lain-Lain		0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)		3,239,943,135
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)		(839,823,626)
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
511125	Beban Tunj. PPh PNS	
511126	Beban Tunj. Beras PNS	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 16-05-2022
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2020
1		2
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	
511129	Beban Uang Makan PNS	
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
521211	Beban Bahan	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
522111	Beban Langganan Listrik	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	
591313	Beban Penyusutan Jaringan	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
522112	Beban Langganan Telepon	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		67,132,211
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7,050,000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	60,082,211
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0
596111	Kerugian Pelepasan Aset	0

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 16-05-2022
 Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI :1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA :538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	2020
1	2
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	67,132,211
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	115,500
491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	115,500
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,072,150
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2,072,150
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1,956,650)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	65,175,561
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	(774,648,065)
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
511125 Beban Tunj. PPh PNS	
511126 Beban Tunj. Beras PNS	
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa	
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	
511129 Beban Uang Makan PNS	
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
596111 Kerugian Pelepasan Aset	
521211 Beban Bahan	
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	
425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	
593111 Beban Persediaan konsumsi	
522111 Beban Langganan Listrik	
521213 Beban Honor Output Kegiatan	
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	
511111 Beban Gaji Pokok PNS	

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 16-05-2022
 Halaman : 5

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1600 KANWIL XVI DJKN MANADO
 SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2020
1		2
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	
591313	Beban Penyusutan Jaringan	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
522112	Beban Langganan Telepon	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa		0
Beban Luar Biasa		0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		(774,648,065)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1800 SULAWESI TENGAH
 JENIS SATUAN KERJA : KD
 SATUAN KERJA : 538002 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

Kode Lap : LPE.SATKER
 Tanggal : 15/05/22 8:28 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	48,718,036,951	49,012,909,444	(294,872,493)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,783,527,675	(774,648,065)	3,558,175,740	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(8,513,466,375)	479,775,572	(8,993,241,947)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,729,938,700)	(294,872,493)	(5,435,066,207)	-
EKUITAS AKHIR	42,988,098,251	48,718,036,951	(5,729,938,700)	-